



Judul : Anggota Kerap Tak Hadir di Rapat, DPR Kaji Sistem Antibolos Australia
Tanggal : Sabtu, 30 Januari 2016
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

Anggota Kerap Tak Hadir di Rapat, DPR Kaji Sistem Antibolos Australia

[JAKARTA] Pimpinan DPR sedang mengkaji sistem terbaik yang mungkin bisa dilakukan di Parlemen Indonesia untuk meningkatkan kehadiran anggota dewan dalam rapat-rapat di DPR, khususnya dalam rapat paripurna.

Seperti diakui oleh Ketua DPR Ade Komaruddin (Akom), pihaknya menyadari betul bahwa banyak anggota dewan yang kerap membolos saat rapat.

“Misalnya untuk rapat paripurna, harus buat sistem. Tak bisa kalau tertibkan semua anggota dengan sanksi. Itu tugas ketua fraksinya, karena anggota takut sama ketua fraksinya, bukan ke ketua DPR,” kata Akom, di Jakarta, Jumat (29/1).

Akom menyatakan, para ketua fraksi juga memiliki *concern* yang sama dengan dirinya terkait masalah itu, dan sama-sama berniat

memperbaiki kelembagaan DPR, termasuk soal absensi.

Sejauh ini, pihaknya sedang memikirkan sistem yang hendak digunakan. Salah satu yang dipertimbangkan adalah sistem di Australia, dimana setiap anggota dewan harus hadir dan datang ke rapat tepat waktu. Bila tidak tepat waktu, maka anggota itu tak punya hak suara.

“Kita perlu kaji, saya tak perlu studi banding ke sana. Tinggal buka komputer saja. Jadi nanti kita akan buat sistemnya, karena di paripurna rata-rata mengambil keputusan. Jadi untuk ketertiban anggota. Jangan yang tekennya ada, tapi orangnya tak ada,” jelasnya.

Dia mengakui, untuk bisa mendapat persetujuan semua pihak di DPR terkait sistem itu, tentu bukan hal mudah. Maka itu dia berharap dukungan semua pi-

hak agar sistem yang memperbaiki kinerja DPR bisa dilaksanakan.

Dipuji

Langkah Ketua DPR yang baru Akom yang memangkas masa reses serta mengurangi kunjungan kerja (kunker) ke Luar Negeri yang bisa menghemat anggaran negara sebesar Rp139 miliar lebih mendapatkan apresiasi dari sejumlah fraksi di DPR.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSP) Saifullah Tamliha mengapresiasi kebijakan Ketua DPR Ade Komaruddin membatasi kunjungan kerja ke luar negeri anggota DPR.

“Pembatasan kunker adalah respons publik agar DPR tidak jalan-jalan namun meskipun efektif perlu mekanisme pembahasan RUU,” kata Saifullah di Gedung DPR disela diskusi bertajuk “*Ketua DPR*

Pangkas Masa Reses dan Anggaran Kunjungan Kerja, Bisakah Target Legislasi Tercapai?”, yang diadakan Koordinatoriat wartawan parlemen, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (29/1).

“Kebijakan Ketua DPR baru merupakan merespons kecaman publik karena menilai anggota DPR suka jalan-jalan dan tidak ada UU yang disahkan,” kata politisi PPP tersebut.

Saifullah menambahkan, reses berbulan-bulan tidak efektif sehingga dirinya merespon baik kebijakan Ketua DPR Ade Komaruddin untuk mengurangi masa reses dari 1,5 bulan menjadi 17 hari.

Senada dengan Saifullah, anggota Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu juga mengapresiasi kebijakan Ketua DPR yang memangkas masa reses karena kinerja DPR dituntut lebih baik oleh rakyat. [H-14]